LAPORAN TAHUNAN 2017

TRANSFORM

LEMBAGA TRANSFORM
Training and Facilitation for Natural Resources Management
Jl. Raden Panji No. A4 Kekalik Jaya, Mataram
Nusa Tenggara Barat
Telp/ Fax : (0370) 648285
Website: www.transform.or.id

TRANSFORM

LEMBAGA TRANSFORM

Training and Facilitation For Natural Resources Management
Training dan Fasilitasi Untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam

Jl. Raden Panji No. 4A Kekalik - Mataram - Nusa Tenggara Barat - 83115
Telp./Fax. (0370) 648285

www.transform.or.id

VISI

Terwujudnya sumberdaya manusia yang kapabel dalam pengelolaan sumberdaya alam yang adil, partisipatif dan lestari.

MISI

1. Mengembangkan metodologi pengelolaan sumberdaya alam yang partisipatif, adil dan lestari.
2. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan pelatihan, menthoring, workshop dan paket-paket pengembangan kapasitas.
3. Memberikan jasa konsultasi, asistensi dan fasilitasi dalam natural resources baik kerterkaitan kedepan dan kebelakang.
4. Mengembangkan model bestpractises dan packet product knowlage.
5. Melakukan kajian dan membuat opini kritis tentang dinamika social dan pembangunan melalui penyusunan pol icy brief dan policy paper.
6. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan visi Lembaga.

LEGALITAS

Akta Notaris	:	DEWI PERMATASARI, S.H., M.Kn. TGL. 28 NOVEMBER 2017 NO. - 12 - KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO.AHU-0000664.AH.01.08.TAHUN 2017 DAFTAR PERKUMPULAN NO. AHU-0000271.60.80.2014 TANGGAL 10 Juli 2014
NPWP	:	02.231.743.2-911.0000
Bank	:	Mandiri KC. Mataram Cakranegara
Nama Akun	:	TRANSFORM
No. Rekening	:	145-00-0448627-6

PENGANTAR DIREKTUR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunianya yang tak terhingga, dimana selama tahun 2017 Transform diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk terus bekerjasama dengan mitra strategis. Selaku pimpinan, kami selalu melakukan ikhtiar bersama Dewan Pengawas dan Pelaksana harian membangun sebuah tim work yang solid untuk mempertahankan eksistensi dan mengembangkan program yang sesuai dengan visi misi lembaga.

Kami menyadari bahwa mustahil bisa berjalan sendirian, oleh karena itu membangun komunikasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak menjadi perhatian penting. Tahun 2017, kami telah bekerjasama dengan beberapa mitra strategis yang memiliki kesamaan visi dan misi. Hasil kerja kolaborasi dengan berbagai pihak inilah yang kami susun dalam sebuah dokumen laporan tahunan. Bagi kami, laporan tahunan ini merupakan wujud pertanggungjawaban publik, atas ikhtiar yang telah kami lakukan di tahun 2017.

Dokumen ini, memaparkan sejumlah program kerja Transform dalam bidang penelitian, pelatihan, fasilitasi program dan pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan program, berbagai tantangan dan permasalahan beriringan dengan sejumlah pembelajaran penting yang telah dicapai. Apresiasi dari sejumlah mitra dan pemerintah atas semua capaian di tahun 2017, mudah- mudahan tidak menjadikan kami lengah, melainkan menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan profesionalisme lembaga.

Sebagai penutup laporan tahunan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada mitra strategis kami PT. H.M Sampoerna, Tbk, Philip Moris Inc., SNV Netherland, GIZ - EnDep, PT. Alliance One Indonesia. Blue Carbon Consortium, MCA- Indonesia dan juga mitra mitra lainnya ditingkat lokal dan Nasional, atas kepercayaan dan kerjasama yang telah terbangun selama ini. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya sampaikan kepada dewan pengawas, dan staf Transform yang telah bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan penuh tanggungjawab.

Terakhir, kami sampaikan bahwa Lembaga Transform cukup terbuka untuk menerima kritik dan saran untuk kebaikan kami ke depan.

Mataram, Maret 2018

Hormat Kami,
Direktur Transform

S U Y O N O, SE

DAFTAR ISI

Pengantar Direktur 3

Gambaran Umum Program 5

Sumber Daya Manusia 2017 6

Program Kerja 2017 7

Inisiatif Program di Tahun 2018 34

Penutup 35

GAMBARAN UMUM PROGRAM

Transform selama tahun 2017 telah menyelesaikan tanggungjawab terhadap program kerjasama dengan beberapa mitra strategisnya. Program yang dilaksanakan ditahun ini pada hakekatnya sebagain besar (85 %) merupakan program yang bersifat short term dan sisanya adalah program long term lebih dari 3 tahun bersifat multi years.

Beberapa Program yang dilaksanakan bersama mitra strategis lembaga Transform di tahun 2017 ini , yakni ;

1. PT Phillip Morris International : Pemberdayaan ekonomi perempuan petani Tembakau dan Buruh tani melalui Community Learning Group (CLG) di 5 desa di Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan mulai Maret – Desember 2017. Lokasi program di Desa Padamara, Desa Jantuk, Desa Kabar, Desa Sinyur dan Desa Batu Putik.

2. PT HM Sampoerna : Program rumah pintar dilaksanakan mulai bulan Juni 2017 – Januari 2018. Lokasi di empat desa di Kabupaten Lombok Timur, yakni : Desa Jantuk, Desa Padamara, Desa Kabar dan Desa Batu Putik.

3. GIZ-EnDev : Program Pendampingan pembentukan kelembagaan Energi Baru Terbarukan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan mulai Maret 2017 – Januari 2018. Lokasi di empat Dusun, yaitu ; Dusun Pegadungan Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara, Dusun Brangkua, Dusun Arung Santek dan Dusun Lepa Loang Desa Labuhan Aji Kabupaten Sumbawa.

4. PT. Alliance one Indonesia (AOI) , Studi Upah buruh Tani Tembakau dan Non Tembakau di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah dilaknakan mulai Agustus – Nopemver 2017.

5. Blue Carbone Consortium (BCC), Survei Knowledge, Attitude, Practices Pengelolaan Pengetahuan Sumber Daya Pesisir Rendah Emisi di NTB dan NTT, dilaksanakan mulai bulan Nopember 2017 – Januari 2018.

6. SNV Netherland; Program Voice for Change Partnership food and Nutrition for All di Provinsi Nusa Tengga Barat. Lokasi program di Kabupaten Lombok Utara, mulai bulan Januari – Desember 2017. Program menggunakan pendekatan multiyear dan diperbaharui setiap tahun.

7. Millennium Challenge Indonesia : Proyek pengelolaan pengetahuan rendah emisi di wilayah pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsorsium dengan PKSPL-IPB, Yapeka dan Transform. Seluruh pengelolaan program di lead oleh PKSPL-IPB.

Dari sejumlah program yang telah dilaksanakan, banyak pembelajaran yang diperoleh mengingat karakteristik masyarakat di masing-masing lokasi program cukup beragam. Pembelajaran tersebut telah menjadi sumber belajar para para mitra strategis dan terutama semua staf Transform untuk meningkatkan pengalaman dan kerampilan dalam mengelola kegiatan, melakukan pendekatan dan komunikasi kepada masyarakat. Beberapa capaian program telah mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholders lainnya.

Sumber Daya Manusia 2017

Tim Managemen		
No	**Nama**	**Posisi**
1	Suyono, SE	Direktur
2	Alfian Pujian Hadi, SP.M.Si	Sekretaris
3	Marwiah	Bendahara
4	Dwi Putri Agustina	Staf Keuangan
5	Dr. H. Markum, M.Sc	Divisi Penelitian
6	Mukhtar, SP. M.Sc	Divisi Pengembangan Ekonomi
7	Alfiah Pujian Hadi, SP. M.Si	Divisi Pengembangan SDA
8	Herly Ersan	Divisi Pengembangan Media dan IT
9	Widia Budi Sastra Susanto	Photografi dan dokumentasi
10	Hariyani, SE	Koordinator Program CLG dan Rumah Pintar
11	Uzlifatul Azmiyati, M.Si	Sekretaris Program
12	Maryati, SP, M.Sc	Staf Umum Adm

Staf Lapangan		
No	**Nama**	**Posisi**
1	Dewi Sinta PJP, SP	Fasilitator CLG dan Rumah Pintar Padamara Lotim
2	Turmuzi, S.Sos	Fasilitator CLG dan Rumah Pintar Desa Jantuk Lotim
3	Jumaidi, SH	Fasilitator CLG dan Rumah Pintar Desa Sinyur Lotim
4	Rabiatul Adawiyah, S.Si	Fasilitator CLG Batu Putik Lotim
5	Saprudin, SPd	Fasilitator CLG Kabar Lotim
6	Jonathan Prederik,	Koordinator Provinsi NTT BCC
7	Agus Mulyadi Ashari, SP	Faskab BCC Lombok Tengah
8	Lalu Kertawan, SP	Faskab BCC Lombok Timur dan Rumah Pintar
9	Masud, S.Ag	Faskab BCC Lombok Utara dan SNV
10	Deni Karanggulimu, SH	Faskab BCC Waingapu Timur dan Sumba Tengah
11	Yulianus Fransiskus Billy, SKM	Faskab BCC Sumbarat Barat dan Sumba Barat Daya.
12	Ir. Rusni	Faskab Lombok Utara Energi Baru Terbarukan
13	Nursyamsu, SE	Faskab Sumbawa Energi Baru Terbarukan
14	Ahmad Zohri	Pengelola Rumpi Kabar
15	Wardatul Khaerani	Pengelola Rumpin Kabar
16	Zaenuddin, S.Pd	Pengelola Rumpin Padamare
17	Baiq Timuriana, A.Md	Pengelola Rumpin Padamara
18	Husnul Khatimah	Pengelola Rumpin Jantuk
19	Mar'atuzzakiyah	Pengelola Rumpin Jantuk
20	Shasya Reginan JM, S.Pd	Pengelola Rumpin Batu Putik
21	Zaenal. S.Kep	Pengelola Rumpin Batu Putik

PROGRAM KERJA 2017

(1)

SAMPOERNA
untuk Indonesia

Pemberdayaan Perempuan Petani dan Buruh Tani Tembakau Melalui Kelompok Belajar Masyarakat di Pulau Lombok

Usahatani tembakau jenis Flue-Cured Virginia (FCV) menjadi andalan petani di Lombok Timur. Usahatani tembakau 57% melibatkan buruh tani perempuan. Namun sayangnya upah yang diterima lebih rendah dari standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Tahun 2017 UMK Kabupaten Lombok Timur Rp 1.637.377/bulan, sedangkan upah yang diterima buruh tani perempuan sebesar Rp 1.000.000/bulan (Rp 40.000/hari) dan upah buruh tani laki-laki Rp sebesar Rp 1.375.000/bulan (Rp 55.000/hari). Kondisi tersebut membuat pendapatan buruh tani tembakau hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bisa dibayangkan, “Bagaimana mereka mampu membiayai pendidikan dan kesehatan bagi keluarganya”. Tentu sulit bagi buruh tani. Namun usaha tani tembakau tetap menjadi kesempatan dan harapan untuk memperoleh penghasilan.

Untuk mengurangi permasalahan tersebut, Lembaga Transform bekerjasama dengan PT HM Sampoerna Tbk. menginisiasi program pemberdayaan perempuan keluarga petani dan buruh tani tembakau melalui kelompok belajar masyarakat. Tujuannya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kelembagaan, ekonomi dan kesehatan, termasuk mengadvokasi pemerintah agar lebih meningkatkan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lokasi Program

Kegiatan dilaksanakan di 5 Desa yakni Desa Padamara, Desa Jantuk, Desa Kabar, Desa Senyiur dan Desa Batu Putik

Durasi Program

November 2016 – November 2017.

Program yang telah dilaksanakan:

1. Penguatan Kelembagaan CLG

Pengurus CLG telah dilatih dasar-dasar fasilitasi, management pengelolaan kelembagaan dan Untuk mendorong kemandirian lembaga, dilakukan proses belajar bersama secara reguler (2 - 3 kali/bulan) yang diinisiasi oleh pengurus CLG. Tujuannya untuk memantapkan proses pelatihan yang diterima sebelumnya dengan melibatkan anggota dan warga lain yang tidak terlibat dalam proses pelatihan. Proses belajar bersama didesain sebagai ruang untuk evaluasi bersama, sharing pengalaman dan merencanakan mekanisme pengembangan usaha di masing-masing kelompok.

2. Pengembangan ekonomi dan Perbaikan Kualitas Kesehatan

a. Pelatihan pemanfaatan pekarangan. Kegiatan ditindaklanjuti dengan pembagian 55.000 bibit sayur-sayuran dan buah-buahan, 450 kg pollybag dan 15 ton kompos. Untuk mendukung keberlangsungan budidaya dan sebagai salah satu unit bisnis kelompok, masing-masing dibangunkan 1 unit kebun bibit. Masyarakat desa sangat terbantu dengan usaha kebun bibit CLG karena selalu tersedia dan tidak perlu memesan bibit ke luar desa. Bahkan sejumlah masyarakat dari desa lain datang membeli bibit ke CLG.

b. Pelatihan pembuatan pupuk cair dan bio-pestisida. Sebanyak 750 liter bio-pestisida dan 750 liter pupuk cair telah diproduksi untuk dibagi kepada masyarakat sebagai bentuk kampanye pentingnya hidup sehat melalui pertanian organik.

c. Pelatihan pembuatan produk minuman seperti Sari Buah Nanas, Selai Nanas, Ice Cream, Kunyit Asam dan Moringa. Setelah pelatihan, anggota CLG mampu membuat minuman sari buah beraneka rasa termasuk aneka rasa ice cream sehat berbahan produk pertanian local.

d. Pelatihan pembuatan produk makanan dengan bahan baku local yang mudah didapat seperti nugget ayam, saos tomat dan saos cabe.

e. Pelatihan pembuatan kerajinan ingke dan kerajinan berbahan baku plastic dan kain bekas.
f. Pelatihan pengemasan dan pemasaran secara online.
g. Pelatihan untuk Pelatih dalam pencegahan Penyakit Green Tobacco Sicknes (GTS). Setelah mengikuti pelatihan beberapa anggota CLG yang terlibat sebagai kader Posyandu, aktif mensosialisasikan kepada petani dan buruh tani langkah-langkah untuk menghindari terkena penyakit GTS pada event Posyandu dan event social lainnya.

3. Pengembangan Usaha CLG

a. Dukungan Keberlanjutan Produksi; Telah didukung dengan bantuan paket bantuan bahan baku dan peraltan seperti Freezer, Cup Sealer, Blender, Mixer, Cool Box, botol kemasan, label produk, dan etalase untuk display produk. Sejumlah produk yang telah dihasilkan, sebagian produk telah mendapatkan izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
b. Dukungan keberlanjutan Operasional; Telah diberikan bantuan stimulant dalam bentuk barang sebagai modal awal untuk rintisan unit bisnis tingkat kelompok dengan membuat galeri produk CLG berupa kios yang berfungsi sebagai tempat penjualan produk sekaligus sebagai sub-distributor untuk penyediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh anggota dan masyarakat.
c. Dukungan Promosi: selain pelatihan pemasaran online, juga diberikan ruang untuk promosi dalam berbagai event pameran yang dilaksanakan oleh PT HM Sampoerna, event pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk Bazaar Ramadhan. Promosi dan pemasaran juga dilakukan dengan memanfaatkan jaringan keluarga, memnitipkan produk ke kios CLG, kios keluarga dan penjulan langsung. Untuk promosi online, CLG memanfaatkan tekhnologi social media seperti Facebook dan WhatsApp.

Penerima Manfaat Program

Program ini telah melibatkan sebanyak 2.723 orang. Jika dihitung berdasarkan keterlibatan pada semua event kegiatan jumlah penerima manfaat mencapai 5.432 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 75 % adalah perempuan.

Dukungan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

- Dukungan pemerintah desa: pemerintah desa, PKK dan beberapa pihak di desa, jika ada event kebutuhan konsumsi dipesan dari CLG. Pemerintah desa juga menganggarkan program pemberdayaan CLG melalui Dana Desa
- Dukungan pemerintah Kabupaten: beberapa event memesan produk acara, dilibatkan dalam beberapa pameran, dilibatkan untuk memberikan sharing pengalaman dan menjadi motivator ke desa lain. Sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah, program CLG telah ditetapkan sebagai program inovasi pengembangan ekonomi desa dan Bupati Lombok Timur memberikan penghargaan pada tanggal 20 Desember 2017

Testimoni

Khusnul Khotimah (Ketua CLG Desa Jantuk)
Ibu-ibu petani dan buruh tani sebelum adanya program CLG tidak memiliki aktivitas yang produktif. Setelah adanya realisasi program CLG, tumbuh semangat untuk berubah karena sudah memiliki keterampilan untuk menghasilkan beberapa produk dan kini sudah ada aktifitas yang bisa menghasilkan uang

Anna Annisa (Ketua CLG Desa Senyiur)
Setelah adanya program CLG, kami mendapat banyak mendapatkan pelatihan sehingga pengetahuan dan keterampilan bertambah. Sebelumnya kami sulit mengumpulkan warga untuk belajar bersama, sekarang tidak sulit untuk mengumpulkan warga, kami juga sudah berani tampil di depan forum untuk menyampaikan pendapat. Kami sangat bersyukur karena sering dilibatkan dalam berbagai pameran yang dilaksanakan oleh Sampoerna dan pemerintah daerah. Kami sangat bangga sekali karena kami warga yang berasal dari dusun yang terpencil mendapatkan juara 1 pada kegiatan Sampoerna Expo dan produk kami dikunjungi oleh Pak Menteri Tenaga Kerja. Itu diluar dugaan kami. Lewat CLG kami bias menunjukan kami juga bisa.

Junaidi, Amd (Kepala Desa Jantuk)
Sebagai pemerintah desa, kami melihat langsung dan merasakan dampaknya. Perubahan yang terjadi pada ibu-ibu di desa sangat positif dan kami perlu lanjutkan karena program ini sangat membantu dalam menumbuhkan semangat dan aktivitas yang produktif bagi ibu-ibu. Yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini sudah mulai berjualan. Program ini telah membantu ekonomi keluarga. Kami berkomitmen untuk mendukung dan melanjutkan program CLG.

(2)

SAMPOERNA untuk Indonesia

PROGRAM RUMAH PINTAR

Budidaya tanaman tembakau menyerap tenaga kerja cukup banyak. Penyerapan tenaga kerja hampir merata pada semua tahapan, menyebabkan beberapa anak terlibat dalam kegiatan prosessing terutama pada saat penggelantangan. Anak-anak biasanya terlibat setelah pulang sekolah. Keterlibatan mereka diketahui dan bahkan sebagian dibiarkan oleh orang tuanya. Upah begelantang untuk tambahan uang saku sekolah dan belanja.

Jika merujuk pada prinsip-prinsip ALP (Agriculture Labor Practices), salah satu prinsip dalam praktek pertanian tembakau adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak, untuk tidak dilibatkan sebagai tenaga kerja. PT HM Sampoerna Tbk. dan supplier berkomitmen secara bertahap menghapus pekerja anak dalam aktivitas pertanian dan prosessing tembakau.

Menyikapi masih adanya keterlibatan anak yang bekerja pada prosessing tembakau, Transform bekerjasama dengan PT HM Sampoerna memfasilitasi agar anak-anak memiliki ruang belajar dan bermain yang produktif diluar waktu sekolah. Salah satu gagasannya melaui program Rumah Pintar. Prinsip dasar program menekankan dalam semua tindakan menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak terutama pendidikan harus menjadi pertimbangan paling utama.

Tujuan Program

1. Menyediakan rumah pintar sebagai tempat belajar dan bermain bagi anak-anak usia 7 – 14 tahun di luar waktu sekolah.
2. Mengurangi keterlibatan anak-anak usia 7 – 14 tahun terlibat dalam prosessing tembakau.
3. Memberdayakan pemuda sebagai sumberdaya lokal untuk berpartisipasi aktif dalam program.
4. Mensosialisasikan prinsip-prinsip ALP kepada anak-anak usia 7 – 14 tahun.

Kategori Penerima Manfaat Program

1. Penerima manfaat utama: Anak-anak petani tembakau binaan dan anak-anak buruh tani yang bekerja pada petani binaan usia 7-14 tahun.
2. Penerima manfaat tambahan: anak–anak petani tembakau non binaan, anak-anak buruh tani yang tidak bekerja pada petani binaan, termasuk anak-anak komunitas setempat.

Lokasi Program

1. Desa Padamara Kecamatan Sukamulia
2. Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia
3. Desa Kabar Kecamatan Sakra
4. Desa Batu Putik Kecamatan Keruak

Fasilitas Layanan

1. Playground
2. Perpustakaan
3. Kursus Bahasa Inggris
4. Kursus Komputer
5. Bimbingan Belajar Matematika
6. Kelas Berenang
7. Group Drumband
8. Kelas Tari
9. Kelompok Qasidah
10. Beladiri Kempo
11. Games Kreatif
12. Group Olah Raga (Volly, Futsal, Sepak bola)

Kelas Berenang

Lokasi berenang di Rinjani Park selama 4 bulan (Oktober 2017-Januari 2018). Frekwensi berenang 4 kali/minggu atau 16 kali/bulan. Jumlah anak dalam setiap berenang sebanyak 50 anak. Jumlah anak yang terlibat sebanyak 260 anak. Untuk memastikan keselamatan anak, diberikan fasilitas kacamata renang, pelampung 4 pelatih dan 4 pendamping. Sampai akhir program frekwensi berenang sebanyak 64 kali.

Jumlah Anak Yang Mengakses layanan di 4 lokasi Program

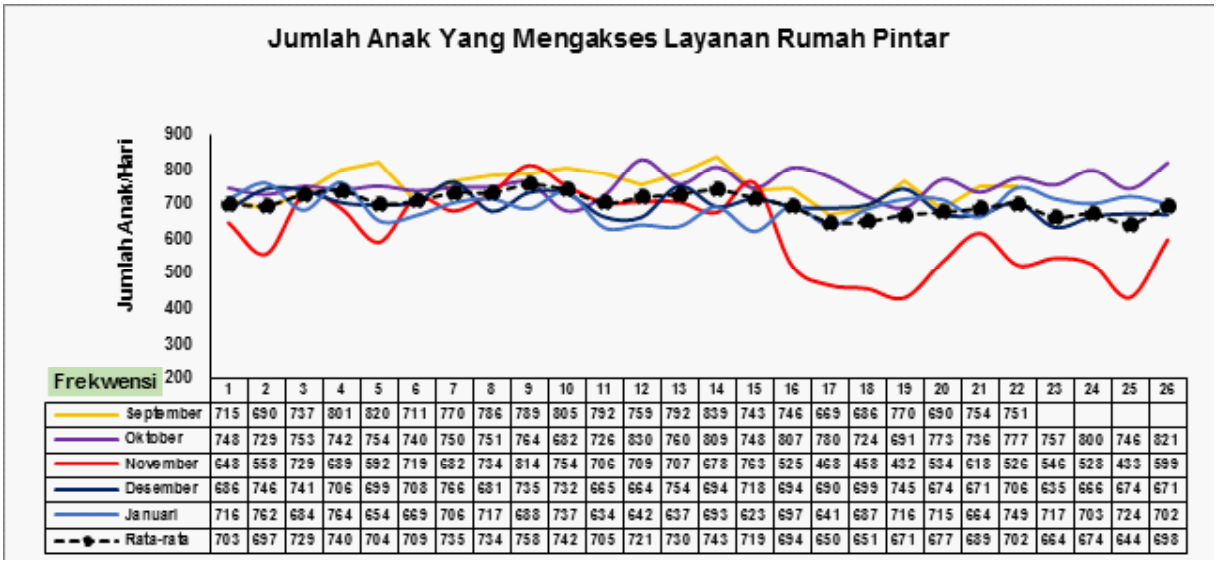

Frekwensi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
September	715	690	737	801	820	711	770	786	789	805	792	759	792	839	743	746	669	686	770	690	754	751				
Oktober	748	729	753	742	754	740	750	751	764	682	726	830	760	809	748	807	780	724	691	773	736	777	757	800	746	821
November	648	558	729	689	592	719	682	734	814	754	706	709	707	678	763	525	468	458	432	534	618	526	546	528	433	599
Desember	686	746	741	706	699	708	766	681	735	732	665	664	754	694	718	694	690	699	745	674	671	706	635	666	674	671
Januari	716	762	684	764	654	669	706	717	688	737	634	642	637	693	623	697	641	687	716	715	664	749	717	703	724	702
Rata-rata	703	697	729	740	704	709	735	734	758	742	705	721	730	743	719	694	650	651	671	677	689	702	664	674	644	698

Penerima Manfaat

Jumlah Anak Usia 7-14 tahun di 4 desa lokasi program sebanyak 2.013 anak. Jumlah anak yang mengakses layanan rumah pintar tertinggi 81% (1.634) anak dan terendah 65 % (1.320) anak. Dari jumlah tersebut 100 % (705 anak) anak penerima manfaat utama TERLAYANI.

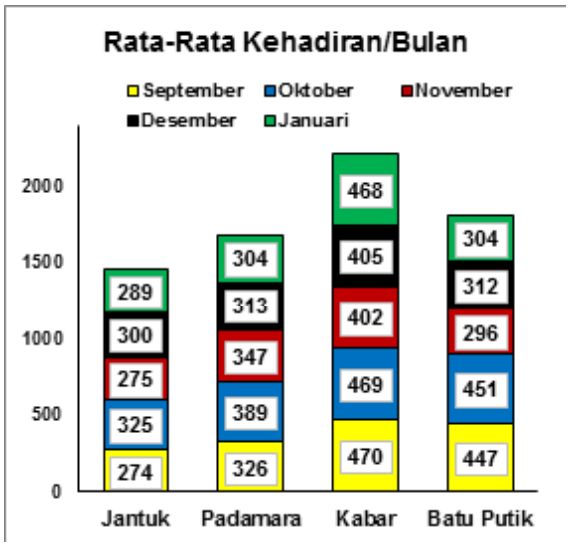

Dampak Positif Program

1. Berkurangnya anak terlibat dalam aktivitas prosessing tembakau. Dari sampel 300 anak, jumlah anak yang terlibat sebelum layanan Rumah Pintar, sebanyak 131 anak dan setelah adanya layanan Rumah pintar berkurang menjadi 84 anak.
2. Perubahan Prilaku anak : Anak lebih sopan dan lebih patuh kepada orang tua.
3. Meningkatnya prestasi dan kedisiplinan
4. Kenyamanan orang tua; Lebih mudah memantau aktivitas diluar waktu sekolah.
5. Meningkatkan kreatifitas anak dengan adanya kegiatan kelas seni, qasidah, tari tradisional, alat permainan dan kegiatan keterampilan.
6. Kebanggaan orang tua: anak-anak bisa mengenal dasar-dasar komputer, bahasa inggris, drumband dan dapat belajar menari.
7. Dukungan guru sekolah terutama dalam persiapan persiapan ujian sekolah.
8. Interaksi sosial anak lebih luas dengan banyak mengenal anak dari dusun lain.
9. Dukungan pemerintah desa; Pemerintah Desa Padamara dan Jantuk, sudah menganggarkan pembangunan rumah pintar dari Dana Desa.
10. Beberapa anak dari Desa lain yang berdekatan dengan lokasi layanan ikut mengakses layanan (komputer, bahasa inggris).
11. Menginspirasi daerah lain di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Lombok Utara untuk membuat Rumah Baca bagi anak-anak didesa.

(3)

Rural Mini Grid Model (RUMI MODEL) di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Proyek RUMI Model komunal menggunakan tenaga surya dibangun di Indonesia diperuntukan bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses kelistrikan. Di Indonesia pembangunan pembangkit tenaga surya, umumnya diprioritaskan di wilayah-wilayah perbatas Indonesia, daerah terpencil dan terisolir.

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat pemerintah Pusat membangun pembangkit listrik tenaga surya dibangun di 4 dusun, yaitu ; Dusun Pegadungan Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Dusun Brangkua, Dusun Arung Santek dan Dusun Lepa Loang di desa Labuhan Aji Kecamatan Badas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pembangkit listrik tenaga surya komunal, dalam realitas menghadapi problem keberlanjutan pengelolaannya. Hal ini terkait dengan kemampuan bayar masyarakat yang masih rendah, kelembagaan tidak kondusif, sumberdaya manusia pengelola memiliki ketrampilan teknis yang masih rendah, dan anggapan masyarakat jikalau pembangkit rusak akan diperbaiki oleh pemerintah.

Tujuan

Tujuan utama dari proyek RUMI Model ini adalah untuk mendapatkan model pengelolaan yang dapat menjaga kesinambungan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang dibangun oleh pemerintah, sehingga mencapai umur pakai yang optimal di empat dusun di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari pencapaian tujuan proyek RUMI Model adalah:
1. Terbentuknya Koperasi atau BUMDes untuk mengelola PLTS.
2. Berkembangnya kelompok bisnis pengelola komoditas local.
3. Tersedianya teknisi terlatih dan dapat diakses dengan cepat oleh pengelola listrik desa
4. Adanya partisipasi perempuan dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis kecil.

Metode Pendekatan

Ada 2 pendekatan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu;
1. Pendekatan buttom up, pendekatan ini ditempuh dengan cara;
   a. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan listrik perdesaan berbasis energy baru terbarukan,
   b. Memperkuat kelembagaan local untuk mengelola PLTS, dan
   c. Masilitasi local (pendampingan) sebagai pelaksana kegiatan lapangan.
2. Pendekatan Top down, dilakukan dengan;
   a. Memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan,
   b. Meningkatkan kapasitas teknisi local, dan
   c. Memperkuat dukungan layanan teknis local.

Aktivitas

Aktivitas utama untuk mencapai tujuan proyek terdiri dari 6 aspek, yaitu;
1. Lokakarya pemetaan peran dan dukungan pemangku kepentingan,
2. Pelatihan pengenalan PLTS bagi pemangku kepentingan di Provinsi NTB,
3. Pelatihan teknis dan pengelola PLTS untuk jasa kelistrikan,
4. Pelatihan pengembangan binis kecil bagi masyarakat,
5. Pelatihan teknis calon jasa teknisi local serta
6. Pendampingan dan fasilitasi secara intensif bagi pengelola dan masyarakat.

Capaian

Baberapa capaian RUMI Model yang telah dihasilkan selama proyek berjalan adalah sebagai berikut;

Kualitas pasokan listrik

Dari aspek ini, maka PLTS selama proyek berjalan dapat beroperasi sesuai umur pakai, yang didukung oleh data kinerja PLTS hasil tinjauan teknis tersedia. Layanan teknis (PLTS) local tersedia, dimana 20 teknisi terlatih dari perusahaan kontraktor local, SMK dan Universitas di Mataram dan Sumbawa. Operator terampil dan professional, dimana para operator PLTS sudah terlatih mengoperasikan, memelihara dan melakukan perbaikan, mengidentifikasi kerusahan dan melakukan pencatatan kinerja PLTS. Kondisi system memenuhi tier 3, dimana pemahaman pengelola mengenai pemanfaatan dan cara pemanfaatan listrik meningkat.

Kualitas pengelola PLTS Komunal

Dari aspek ini, maka kelembagaan berbadan hukum, selama ini PLTS dikelola oleh kelompok yang tingkat keberlanjutannya sangat rendah, sering terjadi konflik antar warga, dan pengurusnya berganti ganti, namun saat ini status kelembagaan telah ditingkatkan menjasi kelembagaan yang berstatus badan hokum. Di Lokasi proyek telah terbentuk dua Koperasi Serba Usaha (KSU) yang telah berbadah hukum dan dua pra Koperasi. KSU yang telah berbadan hukum ini yaitu; KSU Cahaya Surya Pegadungan di Dusun Pegadungan Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara dengan Nomor 007728/BH/M.KUKM.2/III/2018. KSU Arung Pulau Moyo di Dusun Arung Santek Desa Labuhan Aji Pulau Moyo Badan Hukum belum keluar dari Kementrian Koperasi dan UKM. Sedangkan dua pra KSU yaitu KSU Karya Mitra Brangkua Mandiri dan KSU Karya Moyo Utama Dusun Lepang Loang masih dalam Proses pengajuan ijin.

Pengurus/Pengelola PLTS yang terampil dan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan, dimana pengurus telah dilantik dan perempuan di 4 lokasi PLTS masuk dalam struktur kepengurusan KSU dan 50 % binis kecil telah tumbuh dan dikelola oleh perempuan.

Pengelola Unit PLTS terampil dan professional, dimana semua pengelola PLTS di empat dusun telah terlatih, mahir secara teknis operasinoal dan perawatannya.

Lembaga mampu membiayai operasi maintenance secara berkelanjutan, dimana semenjak dilakukan pendampingan dan fasilitasi, maka masyarakat telah bersedia untuk membayar iuran listrik yang tarifnya berkisar Rp 10.000-Rp 15.000, per bulan

per KK. Iuran tersebut dikelola oleh KSU. Para pengelola di empat dusun ini juga telah terlatih.

Pengembangan Ekonomi Desa

Capaian RUMI Model pembangkit listrik tenaga surya di 4 dusun yang selama ini kurang bahkan tidak mendapat sentuhan untuk peningkatan kapasitas usaha, maka semenjak di dampingan dan difasilitasi telah tumbuh bisnis usaha kecil yang dikelola oleh perempuan. Usaha mereka berdiri setelah diberikan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pengelolaan pangan berbahan dasar local oleh program dan Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrin dan UKM. Ibu – Ibu yang telah mendirikan usaha kecil jumlahnya sebanyak kurang lebih 30 orang.

Koordinasi dan Kerjasama dengan Para Pemangku Kepentingan

Upaya ini dilakukan untuk menjembatan peningkatan kapasitas usaha masyarakat dan juga keberlanjutan kelembagaan pengelolaan Pembangkit listrik tenaga surya di 4 dusun proyek. Koordinasi untuk membangun kerjasama dengan melibatkan pemangku kepentingan baik di level Provinsi, Kabupaten dan Desa, seperti ; Bappeda, BPMPD Dukcapil, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bank Indonesia, Pengusaha dan Non Government Organization International.

(4)

SURVEI SISTEM UPAH KERJA PERTANIAN DI LOMBOK

Sektor pertanian menjadi unggulan bagi perekonomian di NTB umumnya dan di Pulau Lombok pada khususnya. Komoditi unggulan pertanian yang menjadi tumpuan masyarakat di Pulau Lombok adalah padi, tembakau, jagung, kedele dan sayuran. Pada saat musim tanam tembakau, kebutuhan tenaga kerja meningkat drastis dibandingkan pada saat musim tanam padi atau palawija. Pada masa-masa dimana kebutuhan tenaga kerja tinggi, maka sebagian besar sumber daya manusia lokal tenaganya terserap pada berbagai kegiatan usahatani mulai dari persiapan lahan, budidaya, pengolahan sampai dengan pemasaran. Namun pada saat-saat tertentu, tenaga kerja petani teralokasi sangat rendah. Dengan dinamika tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap sistem upah yang berlaku pada setiap ragam usahatani tersebut.

Penelitian dilaksanakan di Pulau Lombok, di dua kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan penelitian secara umum adalah mengetahui sistem upah kerja beberapa jenis tanaman pertanian yaitu tembakau, padi, cabe dan tomat, yang banyak dibudidayakan oleh petani di Pulau Lombok. Adapun metode penelitian menggunakan metode deskriptif, untuk mengumpulkan data pada saat sekarang, melalui serangkaian observasi, wawancara, analisis data dan merumuskan suatu kesimpulan. Survey lapangan dilakukan pada bulan Agustus – November 2017.

Responden dalam survei ini adalah petani tembakau binaan yang terdaftar pada PT AOI (Alliance One Indonesia) dan petani non tembakau dimana pada saat musim tanam tembakau, menanam padi, cabe dan tomat. Jumlah responden ditentukan secara random sampling menggunakan pendekatan Slovin, dengan tingkat kepercayaan 90 %. Jumlah responden keseluruhan adalah 228 orang.

Hasil Penelitian

Sistem Upah

Terdapat dua sistem upah yang berlaku dalam usahatani tembakau dan usahatani non tembakau, yaitu sistem kerja harian dan borongan. (1) Sistem kerja harian didasarkan atas waktu kerja buruh, rata-rata selama 8 jam sehari, dan (2) Sistem kerja borongan didasarkan atas hasil kerja (output). Sistem pengupahan kerja harian ada dua, yaitu dalam bentuk uang saja, atau uang+makan. Sebagian besar petani memberikan sistem pengupahan berupa uang+makan. Kisaran besaran upah cukup variatif, jika upah dalam bentuk uang saja, untuk laki-laki antara Rp 35.000 – Rp 80.000 dan untuk perempuan antara Rp 25.000 – Rp 60.000. Nilai rata-rata Upah buruh untuk laki-laki (uang+makan) Rp 55.000/hari dan perempuan Rp 40.000/hari. Sedangkan jika hanya dalam bentuk uang, upah laki-laki Rp 60.000/hari dan perempuan Rp 45.000.

Upah Laki-laki dan Perempuan

Upah buruh perempuan yang berlaku baik untuk usahatani tembakau dan non tembakau, rata-rata Rp 40.000/hari lebih kecil dibandingkan dengan buruh tani laki-laki, rata-rata Rp 55.000/hari. Petani maupun buruh tani memiliki alasan yang beragam terhadap perbedaan tersebut. Alasan yang paling dominan bahwa perbedaan nilai upah karena menganggap pekerjaan laki-laki lebih berat, sudah turun menurun dan menganggap perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Namun jika dicermati lebih mendalam, mengapa upah yang diterima oleh laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan, karena ada perbedaan peran, dimana ada beban kerja yang lebih banyak pada laki-laki.

Faktor Penentu Upah

Hasil wawancara ditemukan, baik petani tembakau maupun non tembakau menyatakan tidak ada standar upah yang menjadi acuan. Faktor yang menentukan besarnya perubahan upah justru tergantung pada buruh tani. Dengan demikian posisi tawar buruh tani dalam penentuan besaran upah cukup menentukan.

Penyerapan Tenaga Kerja

Serapan tenaga kerja/ha dari proses pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan penanganan pasca panen, serapan tertinggi adalah pada usahatani tembakau mencapai 671 HOK, cabe 340 HOK, tomat 225 HOK dan terendah usahatani padi sebesar 130 HOK.

Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Pada tahun 2017 UMK Lombok Tengah sebesar Rp 1.600.000,-, dan UMK Kabupaten Lombok Timur Rp 1.637.377. Berdasarkan hasil penelitian, upah yang dyterima oleh buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan lebih rendah dari UMK. Meski demikian, jumlah upah yang diterima tidak dianggap sebagai pelanggaran, karena buruh tani tembakau dan buruh tani non tembakau tidak tidak secara terus-menerus. Standar upah yang berlaku tidak berdasarkan UMK, tetapi didasarkan atas mekanisme kesepakatan petani dan buruh tani.

Faktor Pembatas dan Pendukung

Faktor pembatas untuk budidaya tembakau paling dominan adalah musim yang sering berubah (perubahan iklim) dan ketidakcukupan modal terutama untuk upah buruh, karena proporsi biaya untuk upah buruh cukup tinggi dan pembayaran upah sebagian besar harus dibayar langsung setelah bekerja. Faktor pendukung yang melatarbelakangi petani mengapa mereka memiliki motivasi kuat untuk budidaya tembakau karena dukungan perusahaan melalui penyediaan input produksi, bimbingan tekhnis dari petugas lapangan, persepsi petani menganggap komoditi tembakau masih lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk lain.

Faktor pembatas pada usahatani non tembakau, adalah kelangkaan tenaga kerja, tingginya upah buruh, dan kenaikan harga input produksi. Sedangkan faktor pendukung usahatani non tembakau adalah tidak membutuhkan lahan yang luas, pasar cukup beragam dalam arti tidak tergantug pada satu pembeli, dan keuntungan cukup besar.

(5)

Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Wilayah Pesisir Rendah Emisi di NTB dan NTT.

Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Wilayah Pesisir Rendah Emisi merupakan salah satu bagian dari Proyek Pengetahuan Hijau yang didanai oleh Milleneum Challenge Account- Indonesia (MCA-I), yang diselenggarakan mulai Oktober 2015 hingga Februari 2018. Proyek yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dalam melaksanakan pembangunan rendah emisi di wilayah pesisir, dilaksanakan di wilayah pesisir Pulau Lombok, NTB dan Pulau Sumba, NTT oleh Konsorsium Karbon Biru (BCC) yang meliputi organisasi PKSPL-IPB, YAPEKA dan TRANSFORM. Dalam implementasi program ditingkat lapangan, maka yang menjadi lead adalah PKLP-IPB dan YAPEKA.

Pelaksanaan proyek pengelolaan pengetahuan di tahun 2017 difokuskan pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi melalui serangkaian lokalatih dalam menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Beberapa capaian hasil program ini meliputi:

1. 474 peserta proyek dilatih (131 peserta adalah perempuan). Kegiatan pengembangan / pelatihan kapasitas mencakup pelatihan tentang GIS, metode dan perangkat SEA-LEDS, pemantauan dan implementasi rencana zonasi pesisir, proses validasi SEA-LEDS, dan pelatihan tentang integrasi praktik pengelolaan sumber daya pesisir dengan emisi rendah dengan rencana pembangunan desa di daerah pesisir;
2. 47 produk pengetahuan dikembangkan, termasuk dua Ringkasan Kebijakan tentang KLS-LED dan integrasi praktik pembangunan rendah emisi dengan perencanaan desa, Lembar Fakta tentang pengetahuan dan pelajaran yang didapat dari modul-modul demo, pelatihan dan pembelajaran tentang SEA-LED.

3. 14 Plot Demo Emisi Rendah dikembangkan di 7 kabupaten di pulau Lombok dan Sumba. Kegiatan plot-demo terdiri dari penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan perikanan, biogas dan bio-slurry untuk pertanian organik, teknologi kompor hemat energi (ESHS) untuk produksi garam, pengembangan ekowisata, produksi dan pengolahan perikanan, dan fasilitas pembudidayaan lobster.
4. 8 kebijakan / pengelolaan baru / ditingkatkan telah disusun, ini terdiri dari KLS-KLS tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di NTB dan peningkatan sistem pengelolaan sumber daya pesisir yang dikembangkan berdasarkan 7 plot-demo.
5. 9 lembaga pemerintah membantu (pemerintah provinsi NTB dan NTT, 3 pemerintah kabupaten di NTB dan 4 pemerintah kabupaten di NTT) melalui kegiatan pengembangan kapasitas / pelatihan dan demo-plot.
6. 316 individu (termasuk 64 perempuan) telah menerapkan teknik yang lebih baik yaitu individu yang menjadi anggota Kelompok Kerja KLS-SEA dan Tim Validasi SEA di tingkat provinsi; dan orang-orang yang secara aktif terlibat dalam struktur organisasi berbasis komunitas yang menerapkan demo-plot pengelolaan sumber daya pesisir emisi rendah di NTB dan NTT (Hasil 3). Hasil ini juga berkontribusi terhadap peningkatan praktik pengelolaan sumber daya pesisir rendah emisi (Hasil 4) yang ditunjukkan oleh proposal indikatif pada kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dengan emisi rendah dalam rencana kerja tahunan desa dan rencana pembangunan desa untuk tahun 2018.
7. 2 institusi pemerintah telah menerapkan teknik yang lebih baik yaitu Pemerintah Provinsi NTB melalui Kelompok Kerja KLS-KLS yang menerapkan perangkat SEA-LEDS untuk melakukan Penilaian Lingkungan Strategis pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di NTB (KLHS RZWP3K NTB); dan Tim Validasi Asumsi Strategis Lingkungan di NTT yang menerapkan perangkat SEA-LEDS dalam memvalidasi SEA di kebijakan, rencana, dan program baru provinsi dan kabupaten (Hasil 3). Baik fungsi kelompok kerja maupun tim sebagai sistem manajemen pengetahuan dan sebagai forum multi pihak (MSF) dalam melakukan atau mengevaluasi KLS untuk setiap kebijakan, rencana, dan program (Hasil 1).
8. Satu Rencana Zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZPW3K) di NTB yang didukung dengan rekomendasi dari KLS-KLHS dan Peraturan Daerah (Perda NTB No. 12, 2017 tentang RZWP3K NTB).

(6)

VOICE FOR CHANGE PARTNERSHIP (V4CP) FOOD AND NUTRISION FOR ALL TO CONTRIBUTION REDUCING STUNTING IN NUSA TENGGARA BARAT 2017.

Gambaran Umum

Program ini terlaksana bekerja sama antara SNV Netherland, Transform, Konsepsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi Nusa Tenggara. Desain program di Nusa Tenggara Barat merupakan turunan dari Program Voice for Change Programme tingkat nasional. Tujuannya adalah : mendorong perubahan prilaku pemerintah lokal dan para pihak dalam penyediaan pelayanan untuk mendukung ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan dan gizi bagi masyarakat miskin dan termarjinalisasi. Selain itu, juga mendorong promosi terhadap lingkungan yang kondusif bagi para actor untuk mengatasi permasalahan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan melalui forum multi stakeholder. Dampak yang diharapkan, adalah berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting balita ditingkat nasional dari 36 % ditahun 2013 menjadi 28% pada tahun 2019

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk rangka mencapai tujuan program, adalah ; meningkatkan kapasitas Tim pengelola dan kelembagaan pada aspek; kepemimpinan, ketrampilan advokasi berdasarkan data/bukti di bidang ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan sinergi dan kerja sama/kolaborasi diantara mitra CSO, seperti: Pemerintah di tingkat; Pusat, Provinsi, Kabupaten dan desa,pihak perusahaan, NGO, SCO, serta masyarakat yang memiliki konsen terhadap isu–isu pangan, gizi dan kesehatan yang meliputi isu air bersih, sanitari dan lingkungan.

Lokus program yang secara otonom berada pada otoritas lembaga Transform adalah di Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu, untuk program ditingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Transform berkolaborasi dengan lembaga Konsepsi NTB.

Output program

1. Meningkatnya kapasitas lembaga dalam mendukung kerja-kerja advokasi. Strategi yang dilakukan adalah : Penyusunan Annual Work Plan Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemetaan potensi ketahanan pangan dan gizi di NTB, Penguatan tentang Outcame Harvesting, Workshop Peningkatan Kapasitas Pendampingan dan Pemberdayaan, Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi, Pelatihan Advokasi FNS.

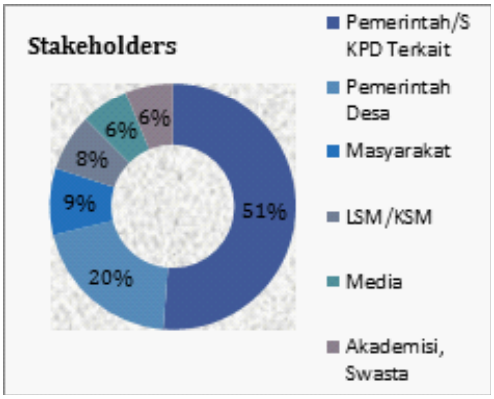

2. Meningkatnya Kerja-kerja advokasi berbasis bukti ketahanan pangan dan gizi terhadap ketersediaan, akses dan pemanfaatan. Strategi kegiatan yang dilakukan adalah :

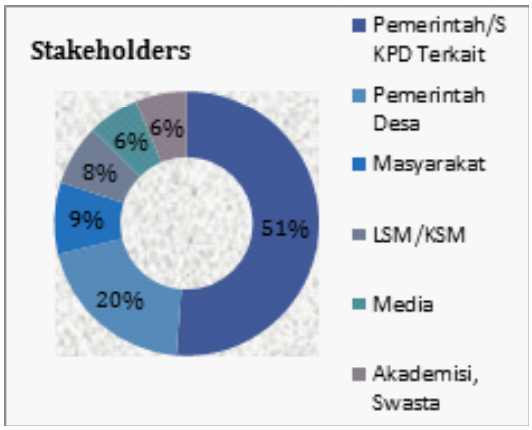

2.1. Deseminasi Program bersama Multi Stakeholder SKPD, NGO/CSO, Media, Masyarakat dan Unsur lainnya di tingkat Provinsi NTB. Tujuannya kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pihak tentang rancangan advokasi program Voice for Change Partnership 2017, Pemetaan dan sinkronisasi program antar stakeholder pada isu/tema ketahanan pangan, gizi dan kesehatan. Membangun dan mendiskusikan peluang kerjasama. Kegiatan melibatkan peserta 24 orang yang berasal dari berbagai unsure di Provinsi NTB diantaranya; Lembaga Transform, Konsepsi, SNV Jakarta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, DP2KBPMD, DKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial) Akademisi, PKK, LSM dan Media.

2.2. Deseminasi Program bersama Multi Stakeholder SKPD, NGO/CSO, Media, Masyarakat dan Unsur lainnya di Lombok Utara. Tujuanya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pihak tentang rancangan advokasi program Voice for Change Partnership. Pemetaan dan sinkronisasi program antar pihak terkait isu/tema ketahanan pangan, gizi dan kesehatan. Dan menjajagi peluang kerjasama antar para pihak untuk kerja-kerja advokasi kebijakan di isu/tema ketahanan pangan, giz dan kesehatan. Sebanyak peserta 25 orang yang hadir di kegiatan ini. Mereka berasal dari berbagai unsure di kabupaten Lombok Utara, diantaranya; Lembaga Transform, Konsepsi, SNV Jakarta, Instansi terkait (Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, DP2KBPMD, DKPP, Dinas Kesehatan, Puskesmas) PKK, LSM dan Media.

2.3. Membangun Strategi kolaborasi Multistakeholder pada Isu Ketahanan Pangan dan Gizi di Lombok Utara.

Tujuan kegiatan : (1) Membangun gerakan dan kesepahaman Forum Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai upaya responsive terhadap isu ketahanan pangan dan gizi. (2) Membangun sinergi dan optimalisasi potensi sumber daya multistakeholder di Lombok Utara sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pagan dan gizi.

Kegiatan Pertemuan Forum Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Lombok Utara ini diikuti oleh 25 orang peserta representasi dari unsure terkait di pemerintahan, masyarakat, media dan LSM di Lombok Utara. Kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini adalah menyuarakan masalah pangan dan gizi serta kesehatan melalui media social whatshapp.

2.4. Lobby dan Koordinasi, Diskusi Formal dan Informal Bersama Pengambil Kebijakan pada Isu Ketahanan Pangan dan Gizi di Lombok Utara.

Tujuan Kegiatan untuk memdorong para pengambil kebijakan melakukan upaya kongkrit dibindang pangan dan gizi. Koordinasi, lobby, konsultasi dengan para pihak terkait telah dilakukan bagi 14 orang peserta (L: 10 dan P: 4). Proses diawali dengan berbagai kegiatan program Transform di KLU, Energi baru terbarukan, Bumdes-LKM, Pembangunan rendah emisi dan program pangan dan gizi. Keseluruhan program Transform di KLU pada akhirnya akan dijadikan sebagai pusat pembelajaran-pembelajaran bagi masyarakat maupun para pihak terkait. Hasil koordinasi, loby dan konsultasi ini adalah adanya komitment yang kuat dari pengambil kebijakan pemerintahan KLU untuk mendukung berbagai program dengan melakukan sharing pembiayaan dan mendorong terbitnya kebijakan kebijakan dibidang pangan dan gizi.

3. Mengembangkan Kerja-kerja advokasi bersama Multi stake holder terkait ketahanan pangan dan gizi dalam hal ketersediaan, akses dan pemanfaatan. strategi yang dilakukan adalah :

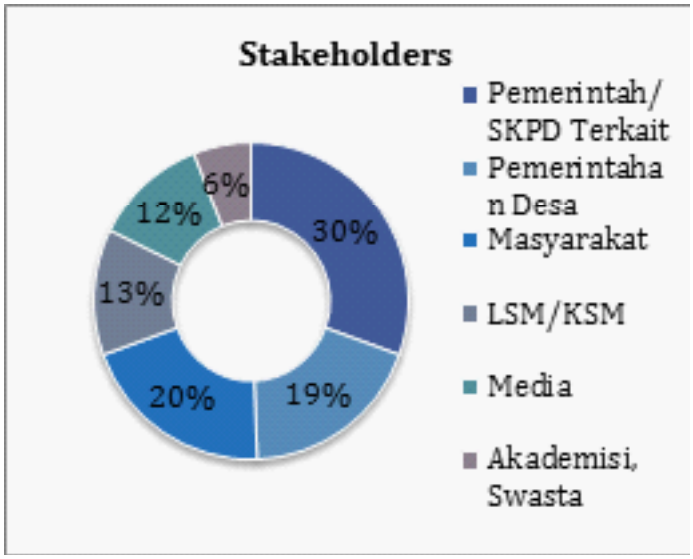

3.1 Diskusi bersama Masyarakat terkait Ketahanan Pangan dan Gizi. Tujuannya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ketahanan pangan, gizi dan kesehatan. Memperkuat kesepahaman bersama masyarakat dalam mendorong kebijakan ketahanan pangan, gizi dan kesehatan. Dan Membangun ruang pembelajaran bersama terkait isu ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan dan giazi .

Kegiatan ini dilakukan di tingkat komunitas yang diselenggarakan 2 kali melibatkan 26 orang peserta dan 20 orang peserta yang berasal dari unsur kader, tokoh masyarakat, aparat desa, puskesmas, bidan desa dan lembaga transform. Hasilnya berupa rumusan bersama terkait, yaitu ; terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran serta ekonomi di masyarakat terkait ketahanan pangan dan gizi.

Pemebelajaranya adalah ; bagaimana mengurangi prevalensi kejadian stunting bagi balita pada masa 1000 hari kelahiran di masyarakat. Stunting merupakan isu baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kata stunting hingga saat ini belum ada kesamaan kesepahaman dan persepsi baik di level pemerintah maupun di tingkat komunitas.

3.2. Penguatan Kelompok Masyarakat terkait Ketahanan Pangan dan Gizi.
Tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang ketahanan/keamanan pangan dan nutrisi. Mengidentifikasi ketersediaan, akses dan pemanfaatan pagan dan nutrisi ditingkat masyarakat desa. Mendiskusikan peluang kerjasama antar para pihak untuk bersama-sama melakukan advokasi kebijakan terkait isu/tema ketahanan pangan, gizi dan kesehatan. Dan Aksi bersama dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan pangan local untuk meningkatkan pangandan gizi keluarga.

Kegiatan diskusi dan praktek tentang pengolahan dihadiri oleh 20 orang yang berasal dari unsur kader, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok ternak dan lembaga local lainnya serta lembaga transform. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta telah belajar melakukan pengolakan pangan berbasis bahan local. Komitmen bersama melakukan proses transformasi pengetahuan dan keterampilan ke masyarakat mengatasi persoalan stunting. Dan Melakukan pelatihan-pelatihan dan share pengetahuan kepada kader-kader desa, terkait stunting. Pemerintah desa berkomitmen persoalan stunting akan menjadi salah satu isu yang dimasukkan dalam perecanaan desa (RPJM Desa).

3.3. Workshop Forum Multi pihak di Kabupaten Lombok Utara.
Tujuan dari kegiatan ini untuk membangun kepedulian dan kesepahaman para pihak terhadap penanganan masalah pangan dan gizi. Workshop diikuti 34 orang peserta (L: 22 dan P: 12). Hasilnya adalah mendorong masyarakat untuk memanfaatan pekarangan untuk mendukung ketersediaan pangan serta pendampingan untuk pengembangan usaha, atau opsi-opsi alternatif yang sudah disediakan oleh program. Meningkatkan kapasitas manejemen usaha dan akses pasar mengembangkan tanaman pekarangan untuk konsumsi rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Melakukan kampanye bersama tentang ketahanan pangan dan gizi, seperti dalaam bidang pertanian akan mengkampanyekan pemanfaatan bio selury ini dapat dijadikan pupuk penyeimbang. Mengembangkan pendekatan pengembangan energi yang bisa mengurangi biaya kost keluarga dan meningkatkan produksi pendapatan dari bio selury. Memperkuat gerakan ketahanan Pangan dan Gizi. Serta menbentuk-bentuk inisiasi komunikasi dan singkronisasi dalam mempercepat penanganan persoalan pangan, kesehatan dan gizi yang seiring dengan Missi Bupati Lombok Utara.

3.4. Workshop membangun kesadaran bersama terkait Ketahanan Pangan dan Gizi di Provinsi. Tujuannya adalah Membangun kesadaran semua pihak tentang pentingnya forum ketahanan pangan dan gizi. Dan Membangun sinergi dengan multisektor dalam forum ketahanan pangan dan gizi.

Kegiatan ini diikuti 30 orang peserta dari berbagai unsur, yaitu; SKPD Propinsi (BAPPPEDA, Dinas Kesehatan, BKP, BPMPD, BP3AKB, Dinas Pertanian), Akademisi/ Universitas, Pers/Media Cetak dan elektronik (TVRI NTB, Lombok Post), Badan Ketahanan pangan provinsi, Program/pihak lainnya-NGO/CSO (Prisma, Oxfam, Care, Plan, dll) serta Transform, Konsepsi dan SNV.

Hasil kegiatan adalah terbangun peluang kerjasama dengan Pihak Media cetak dan elektronik dalam ketahanan pangan dan Gizi, Bappeda, Dinas Koperasi, Bulog, NGO, Perguruan Tinggi untuk pengawalan isu perbaikan pangan dan gizi . Mengawal diskusi kebijakan yang belum kondusif terhadap pangan dan gizi, seperti review RAD PG di tingkat Provinsi dan Kabupaten, Penyusunan peta rawan pangan kabupaten. Masih lemahnya peran media untuk mengkawal isu ketahanan pangan dan gizi, terutama dengan pengelola media dan khususnya bagi para jurnalis yang pemahamanya masih beragam.

4. Meningkatnya Peran Aktif LSM, SKPD, Media dan Swasta dalam membangun sinergi bersama untuk penangann kasus ketahanan pangan dan gizi.

4.1. Koordinasi dan Konsultasi para pihak di Lombok Utara.
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama dan bersinergi bagi multi stake holder tentang pentingnya forum ketahanan pangan dan gizi. Peserta kegiatan 19 orang (L: 12 dan P: 7) dari berbagai unsur pemerintah, kelompok masyarakat maupun media, LSM, PKK dan stakeholder lainnya. Hasilnya adalah adanya komitmen bersama dalam upaya penyelesaian kasus tentang ketahanan pangan dan gizi dan terbangunnya komunikasi lintas sektoral. Ada 3 aspek yang menjadi focus perhatian, yaitu merubah mind set masyarakat, perilaku masyarakat dan akses yang bisa dijangkau dalam penyelesaian persoalan-persoalan ketahanan pangan dan gizi serta kesehatan di Lombok Utara.

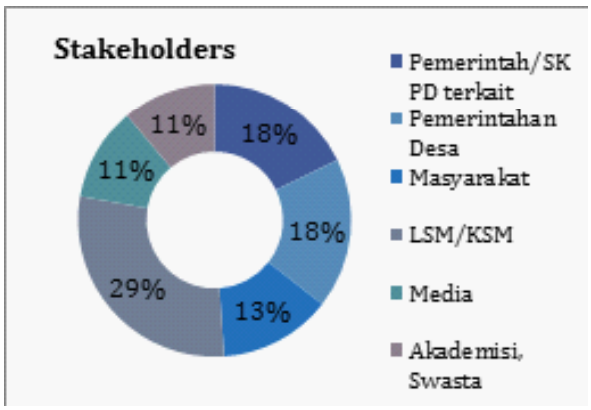

4.2. Workshop Multi Pihak Ketahanan Pangan dan Gizi di Lombok Utara.
Tujuan kegiatan untuk membangun kesepahaman dan meningkatkan pengetahuan bagi para pihak di Lombok Utara (Bappeda, Dinas Keatahanan Pangan dan Gizi, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, NGO dan Media) tentang gerakan bersama pada kerja-kerja advokasi ketahanan pangan dan gizi.

Workshop Forum Multipihak Ketahanan Pangan dan Gizi ini dilaksanakan 2 kali di Kabupaten Lombok Utara dimana pada workshop yang pertama diikuti 46 orang peserta (L: 27 dan P: 19). Dan kedua 34 orang peserta (L: 23 dan P: 11).

Hasil yang dicapai yaitu terpetakanya potensi antar para pihak pada isu/ tema ketahanan pangan, gizi dan kesehatan, adanya agenda bersama sebagai rencana tindak lanjut ke dalam membangun peluang kerja bersama melakukan advokasi kebijakan terkait isu/tema ketahanan pangan, gizi dan kesehatan.

Tiga aspek pada ketahanan pangan dan gizi, meliputi: Ketersediaan, dimana terkait erat dengan produksi pangan yang dipengaruhi faktor ketersediaan lahan pertanian, infrastruktur dan supra struktur pertanian, teknologi produksi yang mendorong optimalisasi produksi pertanian per hektar, penangan pasca panen, dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pangan. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana memproteksi lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Keterjangkauan, dimana terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pangan, kemudahan dalam mengakses dan distribusi pangan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah KLU yaitu, melakukan pemantauan harga pasar bahan pangan, mengadakan pasar tani setiap hari jum'at di lapangan Tanjung, Rencana penyusunan ranperda dibidang pertanian. Konsumsi ; terkait dengan pemanfaatan pangan untuk memenuhi gizi pangan keluarga melalui program sistem kewaspadaan gizi, oleh Dinas Kesehatan, Bappeda dan BPS.

(7)

SURVEY KNOWLEDGE ATTITUDE AND PRACTICE (KAP II) PENGELOLAAN PENGETAHUAN TATA KELOLA SUMBER DAYA PESISIR RENDAH EMISI DI PROVINSI NTB DAN NTT

Pada semester awal proyek, BCC telah mengawali kegiatan dengan melakukan survei KAP I (November 2015), yang dimaksudkan sebagai (1) data dasar untuk menggambarkan profil awal penerima manfaat proyek di lokasi demplot proyek, (2) menyediakan metode untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya input berbagai program.

Saat ini proyek sudah berjalan kurang lebih dua tahun, dari 28 bulan waktu yang direncanakan. Pertanyaannya adalah sejauhmana tujuan proyek ini telah dicapai ? Apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan terutama dalam hal pengetahuan, perilaku dan praktik (KAP) masyarakat tentang pembangunan rendah emisi di kawasan pesisir? Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat terhadap terjadinya perubahan tersebut? Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan survei KAP II, untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi, yang mengacu pada hasil survei KAP I, sebagai data dasar pembanding.

Tujuan KAP Survey II adalah 1) Mengetahui tingkat pengetahuan dan praktik masyarakat di lokasi demplot proyek, setelah diselenggarakan proyek BCC, 2) Membandingkan perubahan yang terjadi tingkat pengetahuan dan praktik masyarakat sebelum dan sesudah diselenggarakan proyek BCC. 3) Mengetahui faktor pendorong dan penghambat perubahan pengetahuan dan praktik masyarakat.

Survei menggunakan metode komparasi, yaitu suatu penelitian yang membandingkan data atau informasi sebelum dan sesudah kejadian, untuk dikompilasi, dideskripsikan, dianalisa dan dientepretasikan serta disimpulkan. Teknik survei menerapkan tindakan observasi lapangan, kaji dokumen dan wawancara dengan narasumber. Lokasi KAP Survei dilaksanakan di tiga kabupaten di Pulau Lombok Provinsi NTB dan empat kabupaten di Pulau Sumba Provinsi NTT. Masing-masing kabupaten ditetapkan sebanyak 2 desa sampling.

Responden yang disurvei adalah para pihak yang menerima manfaat dari proyek di lokasi demplot proyek, terdiri atas unsur: masyarakat, pemuka masyarakat dan aparat pemerintah. Jumlah seluruh responden untuk setiap desa adalah sebannyak 15 orang. Berdasarkan komposisi di atas, maka total responden yang diwawancarai untuk 7 kabupaten adalah sebanyak 210 orang. Jumlah tersebut adalah 90 responden di Provinsi NTB dan 120 responden di Provinsi NTT. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara kepada responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (kuesioner) yang terstruktur bersifat tertutup, dan terbuka.

Analisis data diperlukan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan, perilaku dan praktik masyarakat, dalam pengelolaan kawasan pesisir rendah emisi. Pengukuran tingkat

dimaksud, menggunakan analisis kualitatif dengan metode skoring. Penilaian skoring didasarkan atas pengembangan pertanyaan untuk setiap variabel (4 variabel), dimana setiap komponen mengandung nilai 0-3, angka 0 menggambarkan tingkat pengetahuan/praktik rendah, dan 3 menggambarkan tinggi.

Hasil Survei KAP di Pulau Lombok secara keseluruhan menunjukkan, bahwa pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat terhadap aspek-aspek yang diukur dalam survei KAP memperlihatkan adanya perubahan yang positip dibandingkan KAP1. Perubahan yang cukup mencolok adalah dalam hal perubahan pengetahuan. Sedangkan dalam hal sikap dan praktik, beberapa tetap, dan sebagian menunjukkan perubahan positip. Dan satu hal yang patut dicatat adalah, dari analisis perubahan sebelum dan sesudah proyek BCC, pada semua aspek yang disurvei, tidak ada yang mengalami perubahan negatif (lihat tabel berikut).

Tabel Perubahan KAP di Pulau Lombok

Aspek/Komponen		Lombok Timur		Lombok Tengah		Lombok Utara	
		KAP-1	KAP-2	KAP-1	KAP-2	KAP-1	KAP-2
1.	Konservasi						
	Pengetahuan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
	Sikap	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
	Praktik	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2.	Pemanfaatan						
	Pengetahuan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
	Sikap	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
	Praktik	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
3.	Pengelolaan dan Pemasaran						
	Pengetahuan	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
	Sikap	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
	Praktik	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
4.	Kelembagaan Sosial Budaya						
	Pengetahuan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
	Sikap	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
	Praktik	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : Kompilasi data kabupaten, 2017.

Dengan demikian, setelah proyek BCC, menggambarkan bahwa masyarakat memahami tentang pentingnya prinsip-prinsip lingkungan diterapkan dalam program-program pembangunan dan kegiatan masyarakat. Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, workshop dan pelatihan, telah terbukti mampu memberikan tambahan pengetahuan yang baik, bahwa pada prinsipinya bersentuhan dengan pembangunan lingkungan atau pembangunan rendah emisi, tidak harus berhadapan langsung dengan kegiatan rehabilitasi atau tanam-menanam yang bersifat praktis, tetapi ada banyak hal yang bisa diperbuat oleh masyarakat untuk mendukung perbaikan lingkungan.

Masyarakat di Padak Goar Lombok Timur, menjadi lebih yakin tentang pentingnya melindungi habitat mangrove di Gili Petagan, yang saat ini kondisinya masih utuh. Bahwa mangrove tidak hanya penting untuk pemijahan beragam spesies ikan, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang bisa mendatangkan manfaat ekonomi masyarakat. Masyarakat di Desa Jerowaru mendapat pengetahuan baru, bahwa pemanfaatan sumber energi surya selain bisa menghemat biaya, juga dapat mengurangi emisi, jika dibandingkan harus menggunakan sumber energi dari bahan bakar lainnya. Masyarakat di Kidang memperoleh tambahan pengetahuan, bahwa mengelola tambak ramah lingkungan tidak hanya membuat produksi bertambah banyak, tetapi juga mengurangi pembiayaan pakan. Demikian pula di Kabupaten Lombok Utara, pengetahuan penting yang diperoleh masyarakat adalah bahwa kandang kolektif tidak hanya membuat ternak lebih aman, tetapi membuat lingkungan menjadi lebih bersih.

Oleh karena itu BCC telah berperan sebagai katalisator yang mendorong pengetahuan masyarakat menjadi lebih tahu, dan bersikap lebih positip serta menerapkan hal-hal yang diketahui, selama apa yang diketahuinya dinilai mampu dilakukan dan memberikan manfaat. Tidak semua pengetahuan yang baik akan diikuti oleh sikap dan praktik yang baik, karena dalam realitanya banyak varian yang bisa berpengaruh, sejauh mana pengetahuan tersebut disikapi dan dipraktikkan secara konsisten. Maka setiap responden bisa punya pandangan beragam.

Perubahan KAP Pulau Sumba, hasil survei KAP-2 di Pulau Sumba menggambarkan, bahwa dari ke empat aspek yang menjadi variabel survei (pengelolaan, pemanfaatan, pengolahan, sosio kelembagaan) sebagian besar berada pada kondisi tetap, artinya tidak mengalami perubahan pada KAP1 dan KAP2. Hal ini terutama nampak pada Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Sedangkan untuk Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Timur, mengalami perubahan positip untuk beberapa aspek. Hal yang positip adalah, bahwa dari berbagai perubahan yang ada tidak ditemukan perubahan negatif untuk semua kabupaten.

Tabel Perubahan KAP di Pulau Sumba

Aspek/Komponen		Sumba Barat		Sumba Barat Daya		Sumba Tengah		Sumba Timur	
		KAP-1	KAP-2	KAP-1	KAP-2	KAP-1	KAP-2	KAP-1	KAP-2
1.	Konservasi								
	Pengetahuan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	Sikap	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	Praktik	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
2.	Pemanfaatan								
	Pengetahuan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	Sikap	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
	Praktik	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3.	Pengelolaan dan Pemasaran								
	Pengetahuan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
	Sikap	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi
	Praktik	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi
4.	Kelembagaan Sosial Budaya								
	Pengetahuan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Sikap	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
	Praktik	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi

Sumber : Kompilasi data kabupaten, 2017.

Dari aspek konservasi, KAP tidak menunjukkan adanya perubahan untuk semua kabupaten. Sementara untuk aspek pemanfaatan, yang tampak mengalami perubahan positip ada di Kabupaten Sumba Tengah. Pada aspek pengolahan dan pemasaran, dua kabupaten yaitu Sumba Tengah dan Sumba Timur menampakkan perubahan positip. Sedangkan pada aspek kelembagaan, sosial dan budaya, tiga kabupaten selain kabupaten Sumba Barat, memperlihatkan ada perubahan.

Jika dilihat dari konsistensi antara pengetahuan hubungannya dengan sikap, sebagian besar responden di empat kabupaten menunjukkan adanya hubungan yang konsisten. Artinya kapasitas tingkat pengetahuan yang dimiliki, akan dimanifestasikan ke dalam sikap, secara proporsional. Sebagai contoh hasil KAP2 untuk di Sumba Timur, semua aspek pada KAP menunjukkan kategori tinggi. Hanya persoalannya adalah untuk kabupaten yang lain, rata-rata pengetahuan masyarakat dalam kategori sedang. Namun perubahan pengetahuan dan sikap belum tentu diikuti secara linier dengan perubahan praktik.

Selama periode 2 tahun pelaksanaan proyek BCC, telah terjadi perubahan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat ke arah yang lebih baik, dalam konteks pengelolaan sumber daya pesisir rendah emisi. Perubahan yang lebih baik tersebut terutama dalam hal pegetahuan dan sikap masyarakat, yang perubahannya dari cukup baik menjadi baik. Dalam hal praktik, perubahan yang terjadi di Pulau Lombok adalah dari cukup baik menjadi baik, sedangkan di Pulau Sumba sebagian besar tetap, namun beberapa mengalami perubahan dari kurang baik menjadi cukup baik.

Faktor-faktor yang mendorong perubahan KAP antara lain: (1) pendekatan partisipatif dan kolaboratif memudahkan masuknya isu pembangunan rendah emisi dapat diterima oleh masyarakat, (2) Aspek-aspek yang dikembangkan merupakan situasi riel yang dihadapi dan dibutuhkan oleh masyarakat, terutama terkait dengan isu lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan (3) Dari hasil KAP-1, teridentifikasi bahwa sebenarnya dari aspek pengetahuan, masyarakat telah memiliki kategori pengetahuan cukup (sedang) dan baik, (4) responden sebagian besar (70 %) mengenyam pendidikan formal, dan bahkan ada rata-rata 10 % adalah mengenyam pendidikan tinggi.

Proyek BCC dinilai telah berperan dalam mempengaruhi perubahan KAP, terutama mampu mendorong penguatan masyarakat dalam hal konservasi, kelembagaan sosial dan budaya, fasilitasi perencanaan desa dan pengarusutamaan gender, namun masih dipandang belum berperan dalam mendukung produktivitas masyarakat untuk aspek pemanfaatan, pengolahan dan pemasaran.

Perubahan KAP tidak terjadi linier, artinya peningkatan pengetahuan dan sikap, belum tentu selalu diikuti dengan peningkatan praktik, akibat adanya beberapa faktor pembatas (penghambat) yang terdapat pada masing-masing lokasi demplot. Ada 4 faktor pembatas yang dapat berpengaruh yaitu faktor alamiah, faktor sosial budaya, faktor akses dan faktor kebijakan. Masing-masing desa demplot memiliki faktor pembatas yang berbeda, sesuai dengan karakteristik desanya masing-masing.

Demplot adalah sumber daya berharga, tidak hanya dalam konteks percontohan fisik, tetapi juga berperan dalam merekonstruksikan pengetahuan dan nilai masyarakat, termasuk di dalamnya mendorong kesetaraan gender. Program BCC tidak hanya penting dilihat outputnya, tetapi juga penting dimaknai prosesnya, yang dapat dijadikan sumber pembelajaran untuk masyarakat di desa demplot dan desa-desa sekitarnya.

INISIATIF PROGRAM DI TAHUN 2018

SAMPOERNA untuk Indonesia

1. Pemberdayaan Perempuan Petani dan Buruh Tani Tembakau melalui Kelompok Belajar Masyarakat di Pulau Lombok

2. Program Rumah Pintar di Pulau Lombok

PLAN INTERNATIONAL

Program Winner

AMMAN MINERAL

Survey Verifikasi DAS Dalam Lokasi Rehabilitasi

SNV

Program Voice for Change Partnership food and Nutrition for All di Provinsi Nusa Tengga Barat

PENUTUP

Demikian laporan tahunan 2017 disusun sebagai bentuk komitmen Lembaga Transform untuk memberikan informasi kepada publik terkait dengan seluruh aktivitasnya di tahun 2017. Selain itu, laporan tahunan ini dimaksudkan sebagai bagian dari sharing pengetahuan dan pembelajaran.

Bagi kami, ikhtiar dan karya yang tersaji dalam dokumen ini memiliki makna yang patut kami syukuri. Inilah salah satu bukti kerja kami berjalan menuju visi dan misi yang kami perjuangkan.

Kami percaya, di tahun 2018 akan lebih baik, karena kami terus belajar menjadi lebih baik.